

IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT TRANSFORMASI DIGITAL LAYANAN KEPEGAWAIAN “SITAGUH” PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Ivan Oktobrian ¹

R. Biroum Bernardianto ²

Saipul ³

Universitas Muhammadiyah
Palangkaraya, Palangka Raya,
Kalimantan Tengah, Indonesia

email: mr.ivanbrian@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi transformasi digital dalam manajemen kepegawaian melalui aplikasi “SITAGUH” pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Tengah. SITAGUH merupakan layanan kepegawaian digital jarak jauh yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas pelayanan publik di bidang kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi efektivitas serta mengidentifikasi tantangan dalam penerapan sistem SITAGUH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SITAGUH mampu meningkatkan kualitas layanan kepegawaian dengan mengurangi proses manual dan mempercepat alur pelayanan. Namun demikian, implementasi aplikasi ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi di kalangan ASN, serta kebutuhan akan sosialisasi dan pelatihan sistem secara berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap diskursus mengenai E-Government, dengan menekankan pentingnya perencanaan strategis dan evaluasi berkelanjutan sebagai kunci keberhasilan transformasi digital di lingkungan lembaga pelayanan publik..

Kata Kunci:

Transformasi Digital Kepegawaian,
SITAGUH,
Administrasi Publik,
E-Government,
Kalimantan Tengah

Keywords:

Digital Transformation in Personnel
Management,
SITAGUH,
Public Administration,
E-Government,
Central Kalimantan

Abstract

This study discusses the implementation of digital transformation in personnel management through the “SITAGUH” application at the Regional Civil Service Agency (BKD) of Central Kalimantan Province. SITAGUH is a remote digital personnel service designed to enhance the efficiency, transparency, and accessibility of public services in the civil service sector. The research employs a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observations, and document studies. The purpose is to evaluate the effectiveness and identify the challenges in implementing the SITAGUH system. The findings indicate that the SITAGUH application has improved the quality of personnel services by reducing manual processes and accelerating service delivery. However, its implementation still faces several challenges, such as the limited availability of information technology human resources among civil servants, and the ongoing need for system socialization and training. This study contributes to the discourse on E-Government by highlighting the importance of strategic planning and continuous evaluation as key factors in the success of digital transformation within public service institutions..

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dewasa ini telah menyederhanakan berbagai aspek kehidupan manusia. Kehadiran teknologi ini mampu mempercepat dan mempermudah berbagai jenis pekerjaan yang

sebelumnya rumit dan memerlukan waktu lama untuk diselesaikan. Berbagai kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh teknologi informasi mendorong seluruh bidang kehidupan untuk mengintegrasikan teknologi dalam setiap aspek perkembangannya.

Pada konteks birokrasi, pemanfaatan teknologi informasi menjadi sebuah lompatan penting bagi peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia. Melalui dukungan teknologi informasi, proses pelayanan publik yang sebelumnya kompleks dan memakan waktu dapat disederhanakan serta dipercepat. Meskipun demikian, implementasi teknologi informasi dalam birokrasi masih menghadapi tantangan.

Berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), hanya 13,31% kementerian dan lembaga yang telah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi (Wedhaswary, I. D., 2019).

Menurut Sri Maulidiah (2014), pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan—baik berupa barang maupun jasa publik—yang pada dasarnya menjadi tanggung jawab serta dilaksanakan oleh instansi pemerintah di tingkat pusat, daerah, maupun oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah. Pelayanan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Menyadari pentingnya peran teknologi informasi dalam peningkatan mutu sistem pelayanan publik, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Tengah sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap urusan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, terdorong untuk mengembangkan sistem informasi yang mampu menunjang dan menyederhanakan proses pelayanan kepegawaian yang sebelumnya belum sepenuhnya terdigitalisasi.

Pada tahun 2019, BKD Provinsi Kalimantan Tengah secara resmi meluncurkan Sistem Aplikasi Terampil dan

Tangguh (SITAGUH). Aplikasi ini mulai dioperasikan secara aktif dan menjadi tulang punggung utama dalam pelayanan kepegawaian di wilayah tersebut. Melalui penerapan teknologi informasi dalam SITAGUH, diharapkan terjadi peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan kepegawaian yang pada akhirnya berdampak positif terhadap mutu pelayanan publik secara umum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud menganalisis aspek standarisasi, tingkat keberhasilan, serta perbaikan yang dibutuhkan dalam proses transformasi digital, khususnya dalam implementasi layanan kepegawaian yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui sistem SITAGUH.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai implementasi transformasi digital dalam layanan kepegawaian melalui Aplikasi SITAGUH pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Tengah. Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu mendeskripsikan proses implementasi serta respon pengguna terhadap penggunaan Aplikasi SITAGUH secara mendalam.

Menurut Moleong (2019), metode kualitatif bersifat naturalistik, yaitu meneliti objek dalam kondisi alamiah tanpa intervensi atau manipulasi, dan berorientasi pada pemahaman makna daripada sekadar pengukuran statistik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap berbagai fenomena sosial secara utuh dan mendalam, khususnya dalam konteks kompleks seperti penerapan teknologi baru di sektor publik.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam kepada pejabat struktural yang terlibat dalam manajemen implementasi Aplikasi SITAGUH, serta kepada para pengguna aplikasi tersebut di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada proses penelitian, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara aktif menginterpretasikan data serta hasil wawancara. Sesuai dengan pandangan Creswell (2014), posisi peneliti dalam pendekatan kualitatif adalah sebagai pengamat sekaligus interpreter yang memiliki kepekaan terhadap makna yang terkandung dalam berbagai interaksi dan praktik organisasi.

Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas implementasi Aplikasi SITAGUH, sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses transformasi digital layanan kepegawaian..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standarisasi Pelayanan SITAGUH

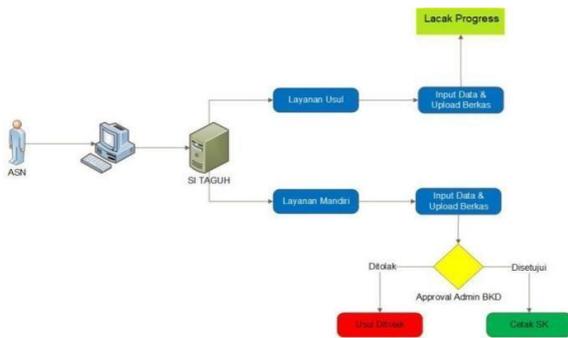
Standarisasi pelayanan publik merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan akuntabilitas birokrasi. Menurut Zeithaml, Parasuraman, dan Berry (1990), kualitas pelayanan publik dapat diukur melalui lima dimensi utama, yaitu tangibles (wujud fisik), reliability (keandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), dan empathy (empati). Dimensi-dimensi tersebut menjadi landasan dalam menilai apakah sebuah sistem informasi pelayanan, seperti SITAGUH, mampu memenuhi ekspektasi pengguna dan standar yang telah ditetapkan.

SITAGUH (Sistem Aplikasi Terampil dan Tangguh) yang diimplementasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan tingkat kesesuaian yang tinggi terhadap prinsip-prinsip pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya dalam hal kejelasan prosedur, waktu pelayanan yang terukur, kemudahan akses, dan transparansi informasi (Ade Teresia, 22/01/2025).

Menurut Lovelock dan Wirtz (2011), keberhasilan pelayanan publik berbasis teknologi bergantung pada konsistensi dan kejelasan standar operasional, serta kemudahan interaksi antara sistem dengan pengguna. Dalam hal ini, SITAGUH memberikan layanan administrasi kepegawaian yang efektif, paperless, dan real-time, yang berdampak pada peningkatan efisiensi kerja, pengurangan beban administratif manual, serta peningkatan kecepatan dan akurasi layanan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelayanan Prima Kepegawaian Mandiri SITAGUH Sistem Aplikasi Terampil dan Tangguh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat dua jenis usulan pada Aplikasi SITAGUH, yaitu Layanan Usul dan Layanan Mandiri.

Layanan Mandiri adalah pelayanan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pada layanan ini, ASN dapat langsung mencetak Surat Keputusan setelah dilakukan persetujuan oleh Administrator BKD. Layanan Mandiri pada SITAGUH merupakan prosedur yang memangkas birokrasi layanan kepegawaian menjadi lebih efektif dan efisien. Melalui layanan ini, ASN dapat menyelesaikan usulan kepegawaian secara daring dalam tempo 1 x 24 jam.



Gambar 1 Standar Prosedur SITAGUH

Layanan Usul merupakan layanan yang menjadi kewenangan instansi vertikal dan/atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah setelah mendapat persetujuan dari instansi vertikal. Melalui layanan ini, ASN dapat mengusulkan layanan kepegawaian dan memantau progresnya secara real-time. Hal ini selaras dengan konsep transparansi informasi, di mana layanan kepegawaian yang sebelumnya sulit dilacak, kini dapat dimonitor dan diselesaikan dengan mudah melalui SITAGUH.



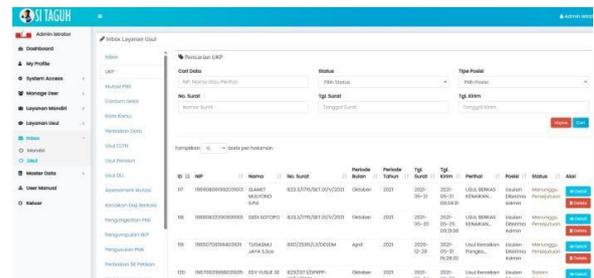
Gambar 2. Tampilan SITAGUH

Konsep E-Government SITAGUH

Konsep E-Government, sebagaimana dijelaskan oleh Heeks (2006), menekankan bahwa digitalisasi layanan pemerintahan harus memperhatikan tiga aspek utama: efisiensi, efektivitas, dan transparansi. SITAGUH telah menunjukkan kontribusi nyata pada ketiga aspek tersebut. Dengan implementasi SITAGUH, layanan kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah menjadi lebih baik karena mampu:

1. Memberikan kepastian hukum dalam layanan kepegawaian;

2. Efisien dalam waktu pengerjaan usulan kepegawaian, mempercepat proses secara signifikan;
3. Efektif, karena ASN di wilayah Kalimantan Tengah yang luas tidak perlu datang ke BKD untuk mengusulkan layanan;
4. Transparan, seluruh layanan usul dapat dipantau dan dilacak secara real-time melalui internet.



Gambar 3. Fungsi Pelacakan Usulan

Respon Positif Pengguna

Kehadiran SITAGUH di tengah masyarakat Kalimantan Tengah disambut dengan berbagai tanggapan positif, khususnya dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi pengguna langsung layanan ini. Sistem ini dinilai mampu memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi kepegawaian tanpa harus datang langsung ke kantor BKD.

Salah satu ASN, Laila Hairita, menyampaikan bahwa SITAGUH sangat membantu dalam proses pengurusan mutasi pindah:

“Sangat membantu karena jarak lumayan jauh dari ibu kota provinsi.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa layanan jarak jauh yang ditawarkan SITAGUH mampu menjawab tantangan geografis Kalimantan Tengah yang luas dan memiliki keterbatasan akses di beberapa wilayah.

Fitur paperless dan layanan jarak jauh memberikan nilai tambah signifikan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Sistem ini mempercepat proses pelayanan sekaligus mengurangi beban administratif manual.

Meski demikian, beberapa pengguna menyampaikan masukan untuk pengembangan sistem ke depan. Agnes, seorang ASN pengguna SITAGUH, menyatakan:

“Tingkatkan layanan agar lebih cepat dan praktis.”

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun layanan sudah berbasis real-time, masih terdapat ekspektasi pengguna terhadap peningkatan efisiensi dan user experience.

Dalam konteks digitalisasi birokrasi, kecepatan dan efisiensi waktu merupakan indikator penting dalam mewujudkan prinsip good governance. Kuswandi, ST, ASN yang memanfaatkan layanan mutasi melalui SITAGUH, menyampaikan:

“Pelayanan melewati website menghemat waktu. Informasi yang didapat pun mudah. Semoga ke depan semakin ditingkatkan lagi. Untuk pelacakan berkas, sudah bisa menampilkan proses sampai mana berkas diproses. Terima kasih. Salam Tabé.”

Secara teknis, SITAGUH dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP, yang dikenal mampu menghasilkan aplikasi yang dinamis, kompatibel, dan responsif. Teophilia Nugrahanny, SS, menilai bahwa sistem ini telah memenuhi harapan dari sisi informasi dan responsivitas:

“Sangat informatif dan responsif. Semoga BKD melalui aplikasi SITAGUH makin inovatif dan memberikan layanan yang terbaik. Terima kasih.”

Pengembangan antarmuka SITAGUH juga mengacu pada prinsip Graphical User Interface (GUI) yang baik. Seluruh menu dirancang agar mudah diakses, dilengkapi dengan petunjuk serta informasi layanan yang jelas,

memudahkan pengguna dalam mempelajari dan memanfaatkan sistem. Hal ini sejalan dengan pendapat Maya Mustika, SP:

“Aplikasi SITAGUH mempercepat proses kepegawaian. Antarmuka aplikasi sangat simpel dan mudah dipelajari. Bravo BKD Kalteng.”

Salah satu kelompok masyarakat yang sangat terbantu oleh aplikasi ini adalah para guru, mengingat banyaknya sekolah yang tersebar hingga ke pelosok desa. Nyoman Selamat, ASN berprofesi sebagai guru, mengapresiasi:

“Terima kasih sudah melayani para guru dengan baik. Semoga kinerja SITAGUH lebih baik dan cepat dari sebelumnya.”

Dari berbagai tanggapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa SITAGUH telah memberikan kontribusi positif dalam reformasi layanan kepegawaian. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan, tetapi juga memperkuat transparansi, partisipasi pengguna, serta akuntabilitas dalam pelayanan publik.

Faktor Penghambat

Meskipun menunjukkan keberhasilan, implementasi SITAGUH juga menghadapi sejumlah tantangan. Menurut Dwiyanto (2006), hambatan dalam digitalisasi layanan publik antara lain meliputi resistensi terhadap perubahan teknologi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta lemahnya infrastruktur pendukung. Kondisi tersebut selaras dengan temuan di lapangan, di mana masih terdapat kesenjangan kompetensi SDM dalam penggunaan aplikasi. Agus Sinjaya Korniwawan, S.Kom, salah satu administrator SITAGUH, menyampaikan:

“Tidak semua ASN di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mampu beradaptasi dengan layanan kepegawaian digital SITAGUH. Beberapa ASN tidak

mengerti dan handal dalam menggunakan komputer dan memanfaatkan internet.”

KESIMPULAN

Implementasi transformasi digital melalui Aplikasi SITAGUH pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan langkah progresif dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kepegawaian. SITAGUH hadir sebagai solusi digital yang tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di wilayah dengan tantangan geografis yang luas. Keberhasilan implementasi SITAGUH turut memperkuat prinsip-prinsip e-Government yang menekankan pada efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam layanan kepegawaian.

Namun demikian, hasil penelitian ini juga mengungkap sejumlah tantangan, seperti masih rendahnya tingkat literasi digital serta adanya resistensi terhadap perubahan digital dari sebagian pengguna. Oleh karena itu, untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas Aplikasi SITAGUH, dibutuhkan komitmen organisasi dalam melakukan pembaruan sistem secara berkala serta sosialisasi yang merata kepada seluruh ASN.

Secara keseluruhan, SITAGUH dapat dijadikan model transformasi digital pelayanan publik yang adaptif dan inovatif. Jika dikembangkan secara berkelanjutan, sistem ini berpotensi menjadi katalisator bagi perbaikan birokrasi di era digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan serta seluruh pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah atas dukungan, kerja sama, dan fasilitas yang telah diberikan selama proses pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, atas arahan, bimbingan, dan dukungan akademik yang telah memungkinkan penelitian ini terselenggara dengan baik dan tepat sasaran.

REFERENSI

- Amelia, R. R., & Yuwono, D. T. (2024). Supporting learning information system through knowledge management optimization using long short-term memory method. *KnE Social Sciences*, 361–371.
- Arafah, A. R. (2019). Upaya-upaya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam menekan angka pernikahan dini: Studi kasus di BKKBN Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan (hlm. 2–3).
- Aprianti, A., Shaluhiah, Z., & Suryoputro, A. (2018). Fenomena pernikahan dini membuat orang tua dan remaja tidak takut mengalami kehamilan tidak diinginkan. *Jurnal Promosi*, 13(1), 6–7.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2020). Rencana strategis Direktorat Bina Ketahanan Remaja tahun 2020–2024. Direktorat Bina Ketahanan Remaja, BKKBN.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2023). Laporan kinerja Bina Ketahanan Remaja tahun 2023–2024.
- Daykaswari, L. C., Irwani, I., & Mambang, M. (2025). The Analysis of Public Satisfaction Index on Services at the Land Office of Seruyan Regency, Central Kalimantan Province, 2023. *Sociopolis*, 1(1), 1-15.
- Direktorat Bina Ketahanan Remaja BKKBN. (2020). Rencana strategis Direktorat Bina Ketahanan Remaja tahun 2020–2024. Jakarta: BKKBN.
- Duana, M., Siregar, S., Anwar, S., Musnadi, J., Husna, A., & Nursia, N. L. (2022). Dampak pernikahan dini pada Generasi Z dalam pencegahan

- stunting. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 195–200.
- Ernawati, H., Ratna, A., Fithriyatul, A., & Setiawan, F. (2022). Pernikahan dini: Cultur serta dampaknya. Banyumas: Amerta Media.
- Fahmy, F., Irwani, I., & Yusuf, M. (2025). Peran Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Penguatan Moderasi Beragama Di Kementerian Agama Kabupaten Lamandau. *ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY*, 40-47.
- Hariyanti, A., & Rahayu, T. P. (2024). Implementation of good governance in improving public service performance at BNNP Central Borneo. *Journal of Public Administration Science: Policy Dynamics Public Services and Bureaucracy Transformation*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.70074/jaspdt.v1i1.2>
- Hasudungan, A. N. (2022). Increasing child marriage in Indonesia during the COVID-19 pandemic: What causes it? *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*, 2(2), 151–161.
- Irwani, I., Susan, E., & Yopiannor, F. Z. (2024). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Pemenuhan Gizi Ibu Hamil Dan Balita Bagi KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Di Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Sukamara Kecamatan Pantai Lunci: Implementation of the Family Hope Program (PKH) to Improve Nutritional Fulfillment for Pregnant Women and Toddlers Among Beneficiary Families (KPM) in Pantai Lunci District, Sukamara Regency, Central Kalimantan Province. *Pencerah Publik*, 11(2), 62-67.
- Jariah, A., Laksminarti, L., & Yusuf, M. (2024). Pengelolaan Dukuh Betung sebagai wisata local culture masyarakat Dayak Kabupaten Katingan. *Jurnal Darma Agung*, 30(1), 1224–1233.
- Junaidi, J., Aquarini, A., & Nauliana, N. (2019). Strategi Komunikasi dalam Keluarga Antar Suku Jawa-Dayak di Kota Palangka Raya: Communication strategy in the Java-Dayak between family in Palangka Raya City. *Anterior Jurnal*, 19(1), 113–120.
- Kamal, S. M. M., Hassan, C. H., Alam, G. M., & Ying, Y. (2015). Child marriage in Bangladesh: Trends and determinants. *Journal of Biosocial Science*, 47(1), 120–139. <https://doi.org/10.1017/S0021932013000746>
- Moerdijat, L. (2025). Pencegahan pernikahan usia dini harus konsisten ditingkatkan. Sekretariat Jendral MPR RI. Diakses 3 Februari 2025 dari <https://mpr.go.id/berita/Pencegahan-Pernikahan-Usia-Dini-Harus-Konsisten-Ditingkatkan>
- Mumek, G. C. (2020). Perlindungan dan upaya hukum dalam menekan maraknya perkawinan anak di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 8(1), 33–40.
- Nasution, A. F. (2023). Metode penelitian kualitatif. Bandung: Harva Creatif.
- Nurjulizar, M., & Irwani, I. (2024). Quality of E-KTP services in the Office Bintaro District District Administrative City Reservation South Jakarta DKI Jakarta Province. *Journal of Public Administration Science: Policy Dynamics Public Services and Bureaucracy Transformation*, 1(1), 7–11. <https://doi.org/10.70074/jaspdt.v1i1.3>
- Oktriyanto, R., Pujihavuty, H., & Amrullah. (2023). Profil Bangga Kencana: Perkawinan anak di Kalimantan Tengah. Palangkaraya: BKKBN Kalimantan Tengah.
- Pramitasari, S., & Megatsari, H. (2022). Early marriage and various factors that affect. *Media Gizi Kesmas*, 11(1), 275–282. <https://doi.org/10.20473/mgk.v1i1.2022.275-282>
- Pratama, M. A., & Mustikaningsih, W. (2022). Politik kesejahteraan; Analisa kesejahteraan masyarakat dalam kondisi triple disruption (kajian para pedagang kuliner lokal desa wisata; antara Pelabuhan Rambang dan Dermaga Kereng Bengkirai). *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 430–441.
- Pratama, M. A., Sintaman, P. I., & Verawati, V. (2022). Peningkatan kapasitas kelompok wanita tani melalui digital marketing dalam memaksimalkan hasil tani yang berkelanjutan pasca pandemi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa*, 5(2), 105–109.
- Pratama, P. R., Satia, R., & Irwani, I. (2025). PERCEPATAN PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA DI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024 BERBASIS KEARIFAN LOKAL (BAHAUM BAKUBA). *Nusantara Hasana Journal*, 4(10), 107-119.

- Putri, N. D. (2022). Faktor sosial ekonomi dalam perkawinan anak di Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(3), 562–571. <https://doi.org/10.23887/jish.v1i3.47789>
- Riyanti, N., Jariah, A., Ariyadi, A., & Selawaty, D. (2023). Actor relationship model in the development of new housing facilities in Palangka Raya City: Problems and urgency of providing public and social facilities. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 13(2), 147–157.
- Satia, M. R., Selawaty, D., Riyanti, N., & Rahman, S. (2024). Kajian strategis tata kelola kolaboratif pasar tradisional Datah Manuah Kota Palangka Raya. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14(3), 87–94.
- Surya, R. A., Ridho, F., & Yuwono, D. T. (2024). Analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer terhadap trend digital forensik pada saat pemilu Indonesia: The bibliometric analysis using VOSviewer on digital forensics trends during the Indonesian election. *Pencerah Publik*, 11(1), 33–41. <https://doi.org/10.33084/pencerah.v1i1.7941>
- Wahyudi, T. (2020). Determinants and consequences of early marriage for women in Indonesia (Tesis). Flinders University of South Australia, Adelaide.
- Yuwono, D. T., Hariyanti, A., & Yunanri, W. (2024). Applying clustering and recommendation system for effective supervision in Central Kalimantan Inspectorate. *Jurnal Informatika Teknologi dan Sains (Jinteks)*, 6(2), 367–374.